

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI POLRES BREBES**

**NASKAH PUBLIKASI**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas  
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

**LUSY NUR SAFITRI**  
NIM. C.100.090.066

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**2013**

## HALAMAN PENGESAHAN

Artikel Publikasi Ini Telah Diterima Dan Disahkan  
Oleh Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada  
Hari : Senin  
Tanggal : 21 Oktober 2013

Pembimbing I



(Muchamad Iksan, S.H, M.H)

Pembimbing II



(Hartanto, S.H, M.Hum)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchamad Iksan, S.H, M.H)

**SURAT PERNYATAAN**  
**PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : LUSY NUR SAFITRI  
NIM : C 100 090 066  
Fakultas/Jurusan : HUKUM/ILMU HUKUM  
Jenis : SKRIPSI  
Judul : PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH  
DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI  
POLRES BREBES

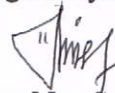
Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Memberikan hak bebas royalty kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Surakarta, 21 Oktober 2013

Yang Menyatakan



(Lusy Nur Safitri)

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI POLRES BREBES**

**Lusy Nur Safitri , C.100090066,**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**ABSTRAK**

*Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu, hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Dalam hukum acara pidana dikenal Asas Praduga Tidak Bersalah yakni setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebenarnya telah mengakomodasikan hak asasi manusia yang dituangkan dalam banyak pasal sebagai hak-hak tersangka atau hak-hak terdakwa secara memadai, akan tetapi dalam perjalanannya apa yang tersurat dalam pasal-pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut kurang ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum khususnya pada tingkat penyidikan dan penuntutan.*

*Asas praduga tidak bersalah yang dianut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang 'inkuisatur' atau inquisitorial system' yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Dengan memperhatikan asas praduga tak bersalah akan melindungi setiap orang yang melakukan tindak pidana dari pelanggaran Hak Asasi Manusia.*

**Kata Kunci : Penerapan, Asas Praduga tidak bersalah, HAM**

**ABSTRACT**

*Criminal law procedure is closely related to the holding of criminal law, therefore, the law of criminal procedure is a set of rules that specify how government agencies ruling that police, prosecutors and the courts have to act in order to achieve the goal by holding a state criminal law. In criminal law the presumption of innocence is known that any persons suspected, arrested, detained, charged or faced trial before the court shall be presumed innocent until*

*the court ruling that declared his mistakes and obtain binding legal force. The Book of Criminal Procedure Law has actually accommodate human rights as outlined in the many chapters as the rights of the suspect or the accused's rights adequately, but in a way what is written in chapters in the Book of the Law Procedural Law the criminal is less well adhered to and implemented by law enforcement officers in particular at the level of investigation and prosecution.*

*The presumption of innocence that adopted the Code of Criminal Procedure Act, provide guidance to law enforcement officers to use akusatur principle in every level examination. Law enforcement officials distanced themselves from the ways that inkuisatur examination or inquisitorial system that put a suspect or defendant in the examination as an object that can be treated arbitrarily. Having regard to the presumption of innocence will protect every person who committed a criminal act of human rights violation.*

Key words: application, presumption of innocence, human rights

## **Pendahuluan**

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu, hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>1</sup> Polri merupakan salah satu aparat penegak hukum, karena Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melakukan penyidikan. Dalam proses penyidikan di antara kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bahwa pejabat tersebut memiliki wewenang yang telah diatur dalam hukum pidana sehingga berwenang melakukan tindakan-tindakan paksa kepada siapa saja yang menurut mereka dapat diduga telah melakukan tindak pidana. Dalam proses penyidikan Polri dilakukan oleh Penyidik Polri,

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 2-3

sesuai dengan fungsi penyidik Polri yaitu penyidikan, maka dalam pelaksanaan fungsinya harus selalu memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Dalam hukum acara pidana dikenal Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*) yakni setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

KUHAP sebenarnya telah mengakomodasikan hak asasi manusia yang dituangkan dalam banyak pasal sebagai hak-hak tersangka atau hak-hak terdakwa secara memadai, akan tetapi dalam perjalanannya apa yang tersurat dalam pasal-pasal di dalam KUHAP tersebut kurang ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum khususnya pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence* dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP, dengan dicantumkannya praduga tidak bersalah dalam penjelasan KUHAP dapat disimpulkan pembuat Undang-undang telah menetapkan sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dari penegakan hukum (*law enforcement*). Asas praduga tidak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip akusatur atau *accusatory procedure (accusatorial system)*.<sup>2</sup>

Dengan asas praduga tidak bersalah yang dianut KUHP, memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang ‘*inkuisatur*’ atau “*inquisitorial system*” yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.<sup>3</sup>

## Rumusan Masalah

---

<sup>2</sup> L & J Law Firm. 2009. *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Didakwa, Dipenjara*. Jakarta : forum Sahabat. Hal. 24

<sup>3</sup> Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.hal. 40

Dengan rumusan latar belakang diatas penulis akan membuat rumusan masalah, antara lain: 1) Apakah Penyidik Polri sudah mentaati dalam penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di Polres Brebes? 2) Apakah kendala-kendala dalam penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di Polres Brebes?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah Memahami konsep asas praduga tidak bersalah dan untuk Mengetahui penerapan asas praduga tidak bersalah di dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan serta kendala-kendalanya. Sedangkan untuk manfaat penelitian adalah Dengan adanya penelitian ini diharapkan bahwa hasil penelitian dapat memberikan deskripsi tentang konsep asas praduga tidak bersalah, Memberikan deskripsi tentang penerapan asas praduga tidak bersalah di dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan serta kendala-kendalanya, Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti, Memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum terutama pihak penyidik dalam penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan.

### **Kerangka Pemikiran**

Fungsi dan tujuan hukum acara pidana (yang dirangkum di dalam Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana atau KUHAP) yang lazim disebut sebagai hukum pidana formil adalah bagaimana agar terciptanya tertib proses hukum dan terjaminnya penegakkan hukum pidana materiil seperti KUHP dan Undang-undang pidana nonkodifikasi lainnya.

Hukum acara pidana, tugas polisi adalah menegakkan ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum dan untuk mencegah bahaya yang mengancam masyarakat atau perorangan. Adapun istilah ketenteraman oleh para sarjana dianggap tidak perlu dicantumkan tersendiri, karena sebagian pengertian sudah

merupakan unsur dari pengertian keamanan maupun ketertiban.<sup>4</sup> Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.<sup>5</sup> Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.<sup>6</sup>

Praduga Tak Bersalah atau “*Presumption of Innocence*” adalah asas yang menyatakan seseorang tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan dia bersalah ini diacuhkan hanya untuk mencari atau kejar setoran terhadap atasan, padahal Asas ini sangat penting sehingga banyak negara yang memasukannya kedalam konstitusinya. Asas praduga tak bersalah merupakan upaya untuk melindungi tersangka dan merupakan upaya penghormatan terhadap manusia yang memiliki harga diri dan sebagai makhluk yang mulia.<sup>5</sup> Asas praduga tidak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip akusatur atau *accusatory procedure (accusatorial system)*. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan mengenai penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di mana tindak pidana pembunuhan termasuk di dalam tindak pidana terhadap nyawa di mana di dalam dalam KUHAP

---

<sup>4</sup> Pertimbangan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>5</sup> *Undang-Undang Nomor Tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana*, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981., Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981., Pasal 6 Ayat 1

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 110

<sup>5</sup> L & J Law Firm, 2009. *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Ditahan, Didakwa dan Dipenjara*. Jakarta : Penebar Swadaya, hal. 72



dimuat pada Bab XIX dengan judul Kejahatan terhadap Nyawa Orang yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.

### **Metode Penelitian**

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Maka dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis terdiri dari berbagai unsur antara lain sebagai berikut: penelitian ini menggunakan metode pendekatan metode pendekatan normatif empiris, Jenis Penelitian ini bersifat Deskriptif, Lokasi Penelitian Polres Brebes Jawa Tengah di mana terdapat kasus tindak pidana pembunuhan yang masih dalam proses penyidikan, untuk jenis data yang digunakan data primer yang bersumber dari Polres Brebes sedangkan untuk sumber data sekunder berasal antara lain: mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, sedangkan untuk metode pengumpulan data peneliti lebih memilih pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview, sedangkan untuk metode analisis kualitatif.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Struktur Organisasi Kepolisian Resort Brebes**

Secara Institusional Kepolisian Resort Brebes ( Polres Brebes) yang ada sekarang waktu penelitian dilakukan merupakan Polres yang dibentuk mulai tahun 1945 di Desa Lengkong kecamatan Wanasari kabupaten Brebes, walaupun saat itu belum diberi nama secara jelas namun kegiatan kepolisian ditingkat kabupaten terpusat disana, seperti pelaksanaan apel sebelum melaksanakan patroli pengamanan wilayah Brebes dan sekembalinya kumpul melaksanakan apel guna penyampaian perintah dan instruksi berpusatdi Desa ini. Pada masa ini adalah rintisan berdirinya Polres walaupun belum memiliki kantor yang tetap kegiatan kepolisian tetap

terlaksana dengan mengikuti ketentuan pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan yang masih serba terbatas. Pada tahun 1947 pada masa pendudukan tentara Belanda di Brebes embrio Polres sudah mulai Nampak namun masih dalam kekuasaan Belanda belum mandiri, baru pada tahun 1948 kedudukan Polisi semakin mantap dan mendapat pengakuan dari Pemerintah Daerah waktu itu di tandai dengan adanya serangan DI TII Pimpinan Karto Suwiryo terhadap kantor Pengairan (terkenal Airan) sebelah barat Kali Pemali dapat di pertahankan oleh Polisi walaupun hanya empat ( 4 ) orang.

Selain itu kegigihan Polri dalam menjaga keamanan masyarakat kembali terjadi pertempuran melawan DI TII di Pengarasan Kecamatan Bantarkawung dengan gugurnya Komisaris Polisi B. Suprpto yang diabadikan sebagai nama Jalan di sebelah Kodim Brebes. Pada tahun 1963 ada pemusatan kegiatan kepolisian tingkat kabupaten dan diberi nama Komondo kepolisian resort atau di singkat Komres dengan dipimpin seorang Komandan Kepolisian resort ( Danres) bernama Komisaris Polisi Musiman. Atas jasa kepolisian dalam mengamankan wilayah Brebes pada tahun 1974 Putra daerah Brebes yang pernah menjadi Ketua DPR GR tahun 1959 Suwardi, SH didampingi Tohir dari Komres Brebes mewakili Bupati menyerahkan hibah tanah dan bangunan yang sejak tahun 1920 digunakan sebagai kantor Bupati untuk urusan Pemerintah Otonom ( *Regent Scup* ) terletak di Jalan Jenderal Sudirman Brebes. Sampai sekarang menjadi kantor Kepolisian Resor Brebes yang membawahi 17 Polsek. Kepolisian Resort Brebes dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resort Brebes yang disingkat Kapolres. Dalam pelaksanaan tugas dalam bidang penegakan hukum dalam hal ini hukum pidana yang dibantu oleh Kasat Reserse Kriminal / Reskrim. Saat ini Polres Brebes di pimpin oleh Kapolres AKBP KIF Aminanto, SH, SIK, MHA dan untuk Wakapolres Brebes adalah Kompol Rio C. Tangkari, SH, SIK., sedangkan Kasat Reskrim Polres Brebes dijabat oleh AKP M.Subkhan. Adapun tugas pokok Kasat Reskrim sesuai dengan Peraturan

Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan dan pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

## 2. Visi dan Misi Kepolisian Resort Polres Brebes

### a. Visi kepolisian Resort Polres Brebes<sup>7</sup>

Terselenggaranya postur Polri Polres Brebes yang profesional selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang mengutamakan pendekatan preventif dan persuasif serta penegakkan hukum secara profesional, proporsional dan menjunjung HAM untuk mampu menciptakan rasa aman bagi kehidupan masyarakat yang demokratis adil dan sejahtera serta menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri.

### b. Misi Kepolisian Resort Brebes<sup>8</sup>

Untuk pelaksanaan visi dari kepolisian Resort Brebes, maka kepolisian resort brebes memiliki misi sebagai berikut:

- 1) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara mudah, tanggap/responsif dan tidak diskriminatif demi terwujudnya keamanan yang kondusif; 2) mengelola dan memelihara sumber daya manusia kepolisian Resor Brebes dalam meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan operasional; 3) menegakkan hukum secara konsisten dan transparan yang dapat menimbulkan kepercayaan dari masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;

---

<sup>7</sup> Rencana Kerja Polres Brebes T.A.2013 Berdasarkan Keputusan Kapolres Brebes Nomor : KEP/31/VI/2012 Tanggal 13 Juni 2012

<sup>8</sup> Ibid.

- 4) memelihara soliditas institusi Polres Brebes dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi; 5) melaksanakan penyelamatan dan memberikan pertolongan kepada masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana alam; 6) meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi di Kab. Brebes dalam rangka terselenggaranya tugas-tugas secara sinergi; 7) menciptakan kondisi keamanan yang kondusif, dan mengaktifkan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan pelaksanaan Pilkadaes dan Pilkada; 8) melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang.
3. Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Polres Brebes

Menurut Kasat Reskrim Polres Brebes Penerapan Asas praduga tak bersalah di Wilayah hukum Polres Brebes khususnya di Sat Reskrim Polres Brebes telah dilaksanakan apabila ada laporan atau pengaduan maka laporan tersebut suatu laporan sepihak masih perlu untuk dilakukan penelitian dengan Penyelidikan dan/atau penyidikan dan apabila telah didapati bukti permulaan yang cukup maka Sat Reskrim Polres Brebes dapat melakukan upaya paksa, baik penyitaan dan penangkapan orang yang dilakukan penangkapan maka dalam tempo 1 x 24 jam segera untuk dilakukan pemeriksaan, maka setelah dilakukan pemeriksaan terdapat cukup bukti atas perbuatannya dan/atau sesuai dengan Undang-undang ancaman hukumannya memenuhi namun apabila dalam tempo 1 x 24 jam setelah dilakukan pemeriksaan tidak cukup bukti maka orang yang ditangkap segera dilepaskan dari penangkapan. Orang yang ditangkap, ditahan dan diperiksa sebagai tersangka harus dijelaskan perkara yang dipersangkakan dengan bahasa yang mudah untuk dimengerti yang bersangkutan. Begitu juga orang yang diperiksa sebagai tersangka belum tentu sebagai orang yang bersalah masih bersifat praduga maa harus dijelaskan hak-hak bagi orang yang diperiksa sebagai tersangka.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> AKP M. Subkhan, SH, KaSat Reskrim Polres Brebes, *Wawancara Pribadi*, Sabtu , 8 Juni 2013, pukul 11.00 WIB.

Penerapan dan pelaksanaan asas paduga tidak bersalah dalam pemeriksaan perkara pidana di Polres Brebes yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, pada umumnya sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tetapi masih ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan.

Penyidikan suatu tindak pidana merupakan salah satu hal yang paling menentukan dalam sistem peradilan pidana. Tidaklah mengherankan apabila dalam hal ini dituntut keberhati-hatian dan ketelitian di samping dedikasi yang paling tinggi dari para penyidik yang menyanggah beban untuk memperoleh bukti dan mencari tersangka pelaku tindak pidana.

Pelaksanaan tugas penegak hukum yang tidak mengindahkan kaidah hukum tertulis, merupakan pelecehan hukum yang sudah jelas tidak dapat ditoleransi dalam sistem pidana di Indonesia atau lebih tepat dikatakan sebagai penyalahgunaan kekuasaan (*mis use of power*) dari penegak hukum.

Tidak dapat diingkari bahwa fenomena semacam ini bukanlah suatu yang ‘*isolated*’ dan hanya terjadi di Indonesia saja, karena dalam berbagai literatur dan liputan media massa kita dapat juga hal-hal semacam itu terjadi di seluruh dunia bahkan terjadi di negara-negara maju.

Akan tetapi masalahnya akan menjadi lain jika peristiwa penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penyidik dalam menyidik suatu tindak pidana semacam itu terjadi pada masa kini di mana bangsa Indonesia yang merdeka telah mempunyai perangkat hukum yang telah mengacu pada hak-hak asasi manusia dan bertujuan utama untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam melakukan penyidikan kepada tersangka pembunuhan yang bernama Toto Raharjo bin Hari Sahari, penyidik dalam hal ini polisi memperlakukan kasar dengan dipukul dan dibentak tapi cuma sekali ini sesuai dengan wawancara dengan tersangka.

---

Tetapi penerapan asas praduga tidak bersalah oleh penyidik dalam hal laporan dan penangkapan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Kasat Reskrim Polres Brebes, penerapan asas praduga tidak bersalah di Sat Reskrim Polres Brebes telah dilaksanakan apabila ada laporan atau pengaduan maka laporan tersebut suatu laporan sepihak masih perlu untuk dilakukan penelitian dengan Penyelidikan dan/atau penyidikan dan apabila telah didapati bukti permulaan yang cukup maka Sat Reskrim Polres Brebes dapat melakukan upaya paksa, baik penyitaan dan penangkapan orang yang dilakukan penangkapan maka dalam tempo 1 x 24 jam segera untuk dilakukan pemeriksaan, maka setelah dilakukan pemeriksaan terdapat cukup bukti atas perbuatannya dan/atau sesuai dengan Undang-undang ancaman hukumannya memenuhi namun apabila dalam tempo 1 x 24 jam setelah dilakukan pemeriksaan tidak cukup bukti maka orang yang ditangkap segera dilepaskan dari penangkapan. Orang yang ditangkap, ditahan dan diperiksa sebagai tersangka harus dijelaskan perkara yang dipersangkakan dengan bahasa yang mudah untuk dimengerti yang bersangkutan. Begitu juga orang yang diperiksa sebagai tersangka belum tentu sebagai orang yang bersalah masih bersifat praduga maa harus dijelaskan hak-hak bagi orang yang diperiksa sebagai tersangka.<sup>10</sup>

Menurut KBO Reskrim Polres Brebes bahwa mengenai asas praduga tak bersalah ini meliputi antara lain:<sup>11</sup>

- 1) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. 2) Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-undang. 3) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang

---

<sup>10</sup> AKP M. Subkhan, SH, Kasat Reskrim Polres Brebes, *Wawancara Pribadi*, Sabtu, 8 Juni 2013, pukul 11.00 WIB

<sup>11</sup> Ibid.

pengadilan wajib dianggap yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 4) Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti rugi kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan/atau dikenakan hukuman administrasi. 5) Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. 6) Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. 7) Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya juga wajib diberitahukan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum. 8) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. 9) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam Undang-undang. 10) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Bahwa dari analisis kasus Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan Berita Acara Pemeriksaan Nomor BP/37/VII/2012/Reskrim di dalam tindak pidana pembunuhan dengan identitas Tersangka adalah sebagai berikut :

Nama : Toto Raharjo bin Hari Sahari  
 Umur : 29 tahun  
 Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Kalipucang RT 02 RW 01 Kecamatan Jatibarang  
Kabupaten Brebes

Secara ringkas Resume Berita Acara Pemeriksaan Nomor BP/37/VII/2012/Reskrim ini adalah sebagai berikut :

a. Dasar

Dasar pemeriksaan adalah Laporan Polisi Nomor Pol: LP/139/VI/2012/Jateng/Res Bbs/SPKT tanggal 29 Juni 2012.

b. Perkara

Pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam primer Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012 sekira pukul 10.30 WIB di desa Kalipucang RT 02 RW 01 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes yang dilakukan oleh tersangka Toto Raharjo bin Hari Sahari, umur 29 tahun, pekerjaan tani, alamat desa Kalipucang RT 02 RW 01 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes terhadap korban Sunarto bin Tara, umur 65 tahun, pekerjaan pedagang, alamat desa Kalipucang RT 02 RW 01 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

Perbuatan tersebut dilakukan tersangka Toto Raharjo bin Hari Sahari dengan cara awal mulanya tersangka Toto Raharjo bin Hari Sahari dari rumahnya telah mempersiapkan golok yang kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012, sekira pukul 10.30 WIB pada saat korban Sunarto bin Tara sedang duduk sambil merokok di teras rumah sambil membawa sebilah golok langsung digorokkan pada leher korban Sunarto bin Tara yang mengakibatkan leher korban mengalami luka sobek yang selanjutnya oleh Tersangka Toto Raharjo bin Hari Sahari diseret dan di bawa ke samping rumahnya yang kemudian pada saat tersangka Toto Raharjo bin Hari Sahari melakukan perbuatan tersebut diketahui oleh saksi Khamami bin Sunarto dan Saksi M. Khumedi bin Sunarto yang kemudian Tersangka Toto Raharjo bin Hari Sahari melarikan diri yang kemudian



dilakukan pengejaran yang akhirnya tertangkap yang selanjutnya dibawa ke Polres Brebes.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Toto Raharjo bin Hari Sahari maka korban Sunarto bin Tara mengalami luka sobek pada bagian leher dan tidak bisa tertolong yang akhirnya meninggal dunia, sehingga terhadap Tersangka Toto Raharjo bin Hari Sahari patut diduga telah melakukan perkara tindak pidana yang dapat diancam dengan hukuman sebagaimana dimaksud di dalam Primer Pasal 340 KUHP dan Subsider Pasal 338 KUHP.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Asas Praduga Tak Bersalah adalah merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan untuk diperlakukan/dianggap sebagai orang yang tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi merupakan bagian dari menghargai dan menghormati hak asasi manusia.

Penerapan dan pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam pemeriksaan perkara pidana di Polres Brebes yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, pada umumnya sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tetapi masih ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan. Penyidikan suatu tindak pidana merupakan salah satu hal yang paling menentukan dalam sistem peradilan pidana. Tidaklah mengherankan apabila dalam hal ini dituntut keberhati-hatian dan ketelitian di samping dedikasi yang paling tinggi dari para penyidik yang menyanggah beban untuk memperoleh bukti dan mencari tersangka pelaku tindak pidana.

Akan tetapi masalahnya akan menjadi lain jika peristiwa penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penyidik dalam

menyidik suatu tindak pidana semacam itu terjadi pada masa kini di mana bangsa Indonesia yang merdeka telah mempunyai perangkat hukum yang telah mengacu pada hak-hak asasi manusia dan bertujuan utama untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>12</sup>

#### 4. Kendala-kendala dalam Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Polres Brebes

Menurut Kasat Reskrim Polres Brebes bahwa faktor-faktor yang mendorong petugas penyidik melakukan kekerasan dalam menginterogasi tersangka selama proses penyidikan tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut: <sup>13</sup>

- a) Karena tersangka dalam memberikan keterangan berbelit-belit. b) Supaya tersangka lebih serius dalam memberikan keterangan selama pemeriksaan. c) Supaya mendapatkan keterangan yang meyakinkan.

Berdasarkan penelitian maka penulis dapat menguraikan bahwa dalam penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan di Polres Brebes terdapat kendala-kendala sebagai berikut :

- 1) Kurangnya pemahaman kesadaran hukum pada tersangka, yang cenderung masih beranggapan bahwa setiap orang yang diperiksa dalam keperluan proses penyidikan di vonis sebagai orang yang bersalah. 2) Ketidaksediaan tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum, bahkan ketika pihak penyidik menawarkan penasehat hukum untuk mendampingi tersangka menolaknya. Dengan tidak didampinginya pihak tersangka oleh penasehat hukum, tentu saja akan menjadi kendala dalam penerapan asas praduga tidak bersalah, karena dari pihak penasehat hukumlah hak-hak tersangka akan dapat lebih terjamin terutama di dalam penerapan asas praduga tidak bersalah selama dalam proses penyidikan. 3) Kurangnya pengendalian

---

<sup>12</sup> AKP M. Subkhan, SH, Kasat Reskrim Polres Brebes, *Wawancara Pribadi*, Sabtu , 8 Juni 2013, pukul 11.00 WIB.

<sup>13</sup> *Ibid.*

sikap dari penyidik dalam proses penyidikan. Sikap penyidik dalam menginterogasi terhadap tersangka pelaku tindak pidana terkadang kurang bisa terkontrol yaitu bersikap kasar pada seorang tersangka. Tidak sedikit para penyidik dalam menginterogasi disertai dengan ancaman dan perlakuan kasar pada tersangka untuk mendapatkan adanya suatu pengakuan dari tersangka. Hal yang demikian inilah yang terkadang membuat seorang tersangka merasa takut untuk berhadapan dengan penyidik dan sering kali keterangan yang diberikan pada penyidik tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya demi memuaskan penyidik.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di Polres Brebes sudah dilaksanakan dan diterapkan tetapi masih belum optimal karena masih diwarnai aksi kekerasan, sehingga apabila dikaitkan dengan teori hukum yaitu fungsi hukum dan penegakan hukum belum dilaksanakan secara benar, hak-hak asasi manusia tersangka dan terdakwa belum dihargai sepenuhnya; Kendala-kendala di dalam penerapan asas praduga tidak bersalah di dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di Polres Brebes yaitu sebagai berikut : 1) Kurangnya pemahaman kesadaran hukum pada tersangka, yang cenderung masih beranggapan bahwa setiap orang yang diperiksa dalam keperluan proses penyidikan di vonis sebagai orang yang bersalah. 2) Ketidaksediaan tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum, bahkan ketika pihak penyidik menawarkan penasehat hukum untuk mendampingi tersangka menolaknya. Dengan tidak didampinginya pihak tersangka oleh penasehat hukum, tentu saja akan menjadi kendala dalam penerapan asas praduga tidak bersalah, karena dari pihak penasehat hukumlah hak-hak tersangka akan dapat lebih terjamin terutama di dalam penerapan asas praduga tidak bersalah selama dalam proses penyidikan. 3) Kurangnya pengendalian sikap dari penyidik dalam proses

penyidikan. Sikap penyidik dalam menginterogasi terhadap tersangka pelaku tindak pidana terkadang kurang bisa terkontrol yaitu bersikap kasar pada seorang tersangka. Tidak sedikit para penyidik dalam menginterogasi disertai dengan ancaman dan perlakuan kasar pada tersangka untuk mendapatkan adanya suatu pengakuan dari tersangka. Hal yang demikian inilah yang terkadang membuat seorang tersangka merasa takut untuk berhadapan dengan penyidik dan sering kali keterangan yang diberikan pada penyidik tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya demi memuaskan penyidik.

### **Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: 1) Seorang tersangka sebagai orang yang belum tentu bersalah hendaknya diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya terutama di dalam proses penyidikan. 2) Perlu diadakan revisi terhadap KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) tentang pencantuman pengaturan tentang sanksi hukum yang setimpal terhadap penegak hukum terutama pihak penyidik yang melakukan penyiksaan atau kekerasan dalam proses interogasi tersangka suatu tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, M.Tatang. 1986. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta:Rajawali.
- Amiruddin, Asikin Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Anonim. 2007. *KUHP*. Jakarta : Trinity, Cet. I
- Basari, Taufik. 2009. *Hak-hak Individu dalam Hukum Bidang Pidana dalam Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Edisi 2009.Jakarta : YLBHI.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamzah, Andi.2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*.Jakarta : Sinar Grafika. Cet.II
- Harahap, Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kaligis, OC. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka Terdakwa dan Terpidana*.Bandung : Alumni.
- Lubis, Sofyan. 2010. *Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- L & Firm J Law .2009,*Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Didakwa, Dipenjara*. Jakarta : Forum Sahabat.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purnomo, Bambang. 1984. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*.Yogyakarta: Amarta Buku.
- Rambe, Paingot dkk. 2010. *Hukum Acara Pidana dari Segi Pembelaan*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali.
- Soesilo, R. 1974. *Taktik dan TeknikPenyidikan Perkara Kriminal*. Bogor: Politea.

Suharto, Y.B. 2008.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta :Gramedia Pustaka Utama.

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Rencana Kerja Polres Brebes T.A. 2013 Berdasarkan Keputusan Kapolres Brebes Nomor : KEP/31/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012.